

TAJUK RENCANA

Yogya Bukan Padang Kurusetra

VIRAL video kelompok bersenjata, membawa senjata tajam di Kawasan Babarsari, mengusik banyak perhatian. Seolah-olah Yogya adalah Padang Kurusetra, kancah Perang Baratayudha antara Pendawa dan Astina. Banyak pertanyaan yang muncul, ada apa dengan Yogya? Kota yang biasanya tenang, tenteram dan menjadi *jujungan* studi dari luar daerah serta pariwisata, tiba-tiba menjadi ajang kekerasan fisik bersenjata.

Wajar kalau kemudian Gubernur DIY Sultan HB X merasa prihatin, melihat video dan berita di media massa mengenai bentrok berdarah tersebut. Bukan hanya ada korban cedera parah, namun ruko dan 7 sepeda motor terbakar. Ini sudah sangat serius, (KR 5/7). Karenanya Sultan meminta Polisi jangan segan, harus tegas menindak para pelaku penganiayaan dan perusakan. Sebab tidak akan ada efek jera apabila polisi tidak menindak pelaku yang bersalah. Ini akan menimbulkan contoh dan preseden buruk.

Gubernur DIY meminta polisi jangan hanya meleraikan. Kalau melanggar hukum ya tetap tegas proses hukum. Menurut Gubernur DIY, jika polisi tidak tegas, maka peristiwa semacam itu bisa akan terulang. Beberapa kali Sultan menyatakan, Yogya bukan ajang kekerasan fisik.

Sejumlah elemen di Yogyakarta juga menyedalkan hal tersebut. Di antaranya adalah Sekber Keistimewaan, yang menyatakan seharusnya polisi jangan hanya bertindak setelah kejadian tersebut terjadi. Namun harus dilakukan deteksi, agar jangan sampai kejadian tersebut pecah. Adanya polisi di lokasi, tentu akan membatalakan bentrok antarkelompok.

Sungguh, aksi tersebut tidak bisa dianggap sepele. Sebab akan berpengaruh terhadap wajah Yogya yang selama ini tenang. Yogya yang dianggap sangat menghormati suasana ketenangan menjadi impian orangtua untuk menyekolahkan anaknya di Yogya. Memang kekerasan jalan semacam klithih beberapa

kali terjadi, namun tidak seperti yang terjadi sekarang. Terang-terangan siang harus membawa pedang sambil diacung-acungkan siap bertempur.

Dalam bidang pariwisata, DIY baru saja mengalami panen wisatawan setelah 2 tahun mati suri karena dampak pandemi Covid-19. Sekitar dua tahun harus *ngampet* tidak bisa menikmati andalan bisnis wisatawan. Wajar sangat senang, meski masih dalam suasana pandemi namun diizinkan melonggarkan dalam gerakan 3 M di lokasi terbukti tidak akan memberikan kesempatan pariwisata menggeliat. Liburan sekolah di Yogya saat ini saja, Yogya kedatangan ribuan wisatawan yang karena menganggap Yogya itu aman dan nyaman. Pariwisata itu sangat rentan terhadap peristiwa kekerasan, inilah yang dikhawatirkan peristiwa perkelahian antarkelompok tersebut akan memberikan dampak buruk bagi pariwisata Yogya.

Belum lagi lebih dari seratus jumlah perguruan tinggi Yogya. Meski belum seluruhnya kuliah tatap muka, namun Yogya mulai dipadati mahasiswa. Karena itu, suasana tersebut tentu juga akan mengganggu ketenangan belajar. Pengusaha UMKM dalam hal ini misalnya warung-warung kecil di sekitar kampus, tentu juga akan terdampak pada hal yang mengusik ketenangan, kedamaian Yogyakarta.

Mudah-mudahan semua pihak segera menyadari bahwa peristiwa tersebut bukan hanya merugikan pihak yang bertikai, terlebih korbannya yang sampai cacat tetap, Namun mengusik ketenangan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sultan HB X bahkan menagih janjinya, ketika mengadakan dialog dengan kampus dan asrama dan untuk tidak melakukan aksi kekerasan.

Saatnya, semua elemen duduk menyelesaikan ketidakcocokan. Sultan HB X jika diminta bersedia untuk melakukan mediasi. Jadi, mengapa harus berkelahi? Padahal begitu indah persatuan dan kebersamaan. (***)

BPJS Kesehatan Tanpa Kelas

PER FEBRUARI 2022, jumlah total peserta JKN-KIS adalah 236,8 juta jiwa atau sekitar 86% dari populasi penduduk Indonesia. Masih ada sekitar 14% penduduk yang belum terdaftar menjadi pesertanya. Padahal pemerintah mempunyai target untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta.

Program JKN-KIS kepesertaannya dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan, PD Pemda (Penduduk yang didaftarkan Pemda), PBPU dan BP (Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja) atau yang lebih dikenal sebagai peserta mandiri dan PPU (Pekerja Penerima Upah). Semua peserta JKN-KIS harus membayar iuran setiap bulannya sesuai dengan jenis kepesertaannya masing-masing.

Besaran iuran adalah sebesar Rp. 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. Khusus untuk kelas III, per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000 dengan pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000. Iuran sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II. Bagi peserta yang mendapatkan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I sebesar Rp 150.000 per orang per bulan.

Tanpa Kelas

Pemerintah sudah menggaungkan informasi, program pelayanan untuk peserta BPJS Kesehatan akan dilaksanakan dengan penerapan kelas standar atau satu kelas atau tanpa kelas. Di negara-negara lain program asuransi sosial seperti BPJS Kesehatan tidak menerapkan kelas-kelas pelayanan seperti di Indonesia. Tentu saja kebijakan tersebut akan berdampak pada besaran iuran yang harus dibayarkan peserta mandiri atau PBPU dan BP. Peserta mandiri mempunyai beberapa pendapat terkait dengan BPJS Kese-

Sri Sularsih Endartiwi

hatan tanpa kelas.

Pertama, peserta yang pada saat ini sudah memilih kelas III untuk kepesertaannya merasa khawatir jika nanti menjadi tanpa kelas, iurannya akan naik dan mereka menjadi tidak mampu lagi untuk rutin membayar iuran yang bisa berdampak pada terjadi penung-gakan. Misal saja dalam 1 KK harus menanggung 4 peserta, pada saat ini



KR-JOKO SANTOSO

mereka membayar Rp 35.000 per anggota keluarga maka dikalikan 4 maka total membayar iurannya sebesar Rp 140.000 per bulan. Seandainya naik misal Rp 10.000 jika dikalikan 4 anggota harus menambah Rp 40.000 per bulan. Sedangkan gaji ataupun upah tidak naik, harga kebutuhan pokok juga tinggi. Otomatis akan memberatkan,

Biasa Saja

Kedua, peserta mandiri yang saat ini sebagai peserta kelas II secara umum merasa biasa saja dengan kebijakan BPJS Kesehatan tanpa kelas ini. Peserta beranggapan kemungkinan iurannya akan turun daripada yang saat ini sudah mereka bayarkan. Hal senada juga

disampaikan oleh peserta JKN-KIS dari kelompok PPU (Pekerja Penerima Upah), yang merasa tidak terlalu berpengaruh jika akan diterapkan BPJS Kesehatan tanpa kelas.

Ketiga, adalah peserta mandiri kelas I. Pada peserta mandiri yang saat ini memilih pelayanan kesehatan di kelas I dan membayar iuran sebesar Rp 150.000 merasa resah jika nanti BPJS Kesehatan dibuat tanpa kelas. Kece-masan tersebut bukan pada besaran jumlah iurannya, melainkan pada kualitas pelayanan kesehatan.

Seperti yang sudah kita ketahui untuk melaksanakan kebijakan tanpa kelas ini, pemerintah akan menerapkan 12 (dua belas) kriteria pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pemerintah terutama BPJS Kesehatan harus memberikan edukasi kepada masyarakat terutama peserta terkait dengan kebijakan yang akan dijalankan. Sehingga peserta tidak berada dalam kegalauan.

Pada umumnya peserta mandiri berharap jika kebijakan tanpa kelas ini sudah dilaksanakan, rumah sakit tetap memberikan pelayanan yang berkualitas dan tidak merugikan bagi peserta. □

***)Sri Sularsih Endartiwi SKM MPH, Dosen Prodi Kesehatan Masyarakat STIKes Surya Global Yogyakarta.**

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah bisa dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/Scan KTP
atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.
Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks.
Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Yogya Macet Lagi, Macet lagi!

MASA liburan di Yogya, sungguh tidak nyaman. Kemacetan ada di mana-mana. Pengalaman saya hari Sabtu lalu, dari Bantul ke Sleman memakan waktu lebih 2, 5 jam. Rekor waktu terpecahkan saat liburan di Yogya. Saya berbincang-bincang dengan sopir wisata dari Jakarta mengantar tamu ke Yogya juga mengeluh kalau dapat carteran ke Yogya. Saya bayangkan, tahun depan atau mungkin 5 tahun kemuka, macam apa jalanan di Yogya se-

makin padat dan sulit bergerak. Maka kesan Yogya macet lagi, macet lagi, akan membuat orang berpikir ulang ke Yogya.

Maka saya usulkan, bagaimana membuat kantung parkir dipinggir kota. Rasanya di luar negeri, objek wisata dengan parkir area rata-rata tidak dekat. Jadi saatnya, Yogya membangun parkir area agar wisatawan dan warga nyaman jalan di Yogya. □

Sudaryanto M. Seturan
Caturtunggal Depok Sleman.

MyPertamina, Aturan Paling Aneh

UNTUK membatasi konsumsi BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar agar lebih tepat sasaran, di buatlah aplikasi MyPertamina. Dan sejak 1 Juli 2022, konon ujicoba sudah dilaksanakan di 11 kabupaten/kota termasuk Kota Yogyakarta. Di tengah keluhan soal server dan internet ngadat, terus terang saya se-pakat dengan tujuan membatasi konsumen pertalite dan solar yang sering salah sasaran.

Namun sejujurnya peraturan ini

aneh bahkan mungkin paling aneh. Karena dengan menggunakan aplikasi itu, setiap ke SPBU kita harus menunjukkan pendaftaran kita, artinya membuka/menghidupkan HP. Padahal di SPBU jelas-jelas ada gambar HP dicoret merah. Artinya tidak boleh menghidupkan HP. Dan ini aturan internasional. Jadi apakah ini bukan aturan paling aneh di dunia? □

Purwanto, pengemudi taksi ting-gal di Condongcatur.

SEBAGAI badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat, Tamansiswa memiliki ideologi. Seiring perubahan alam dan zaman, seolah-olah ideologi tersebut dengan visi, misi, dan tujuannya tersamarkan. Makna hakiki badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat tidak lagi nyata dan yang tampak fatamorgana.

Saat *Gerombolan Selama Kliwonan* menugasi Suwardi Soerjaningrat menggarap jiwa merdeka anak-anak bangsa Indonesia, lahirlah Tamansiswa pada 3 Juli 1922. Ketika ideologi Tamansiswa mewujudkan manusia merdeka tampak nyata. Merdeka universal, konteksnya bukan kemerdekaan individual melainkan sekaligus *hamemayu hayuning sarira, hamemayu hayuning bangsa lan hamemayu hayuning manungsa*. Kemerdekaan, keselamatan, dan kebahagiaan diri, bangsa, dan umat manusia. Kemerdekaan diri tidak boleh merampas kemerdekaan orang lain, bangsa, dan umat manusia. Demikian pula sebaliknya. Kemerdekaan bukan semata-mata hak, tetapi sekaligus kewajiban mewujudkankannya.

Ideologi Tamansiswa dirumuskan dalam Panca Dharma Tamansiswa, ialah (1) kodrat alam, (2) kemerdekaan, (3) kebudayaan, (4) kebangsaan, dan (5) kemanusiaan. Hidup dan kehidupan manusia tunduk kepada hukum-hukum alam kodrat Illahi yang merupakan hak prerogatif Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan bagi manusia adalah hak, namun hak itu harus diperjuangkan sebagai kewajiban untuk menghormati kemerdekaan diri dan orang lain.

Hidup dan kehidupan manusia memerlukan sarana kebudayaan. Dengan berkebudayaan manusia menjalani hidup dan kehidupannya tidak semata-mata berdasarkan naluri belaka. Kebangsaan dalam pandangan Tamansiswa adalah nasionalisme atau rasa kebangsaan yang menjalar

Ki Sugeng Subagya

dari diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Rasa kebangsaan tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan. Rasa kebangsaan merupakan wujud menyatukan kepentingan bersama sebagai satu bangsa yang menafikkan perbedaan suku, agama, ras, bahasa, dan bawaan biologis lainnya.

Mengancam

Pada masa kekuasaan kolonial ideologi Tamansiswa tidak tampak sebagai fatamorgana. Ideologi yang nyata mengancam kelangsungan kekuasaan kolonialisme. Jika dari setiap diri anak bangsa Indonesia telah tumbuh dan berkembang jiwa merdeka, bukan tidak mungkin suatu ketika menjelma menjadi tuntutan kemerdekaan politik. Dengan demikian kekuasaan kolonial harus berakhir. Pemberlakuan pajak pendidikan (*onderwijs ordonantie*) pada 1932 merupakan salah satu contohnya. Tujuannya untuk melemahkan, jika mungkin Tamansiswa harus ditutup. Pada zaman pendudukan Jepang semua sekolah Tamansiswa ditutup.

Pasca-kemerdekaan, ideologi Tamansiswa yang terlihat hanya fatamorgana. Meskipun Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap 2 Mei yang merupakan hari lahir Ki Hadjar Dewantara Bapak Pendiri Tamansiswa, namun Sistem Pendidikan Nasional tidak lagi bersentuhan dengan ideologi Tamansiswa. Semboyan Kemeriterian Pendidikan hanya diambil sebagian dari trilogi Tamansiswa, *tut wuri handayani*. Padahal *tut wuri handayani* tidak akan bermakna tanpa *ing ngarsa sung tuladha lan ing madya mangun karsa*. Pendidikan dan pengajaran

yang hanya *tut wuri handayani* akan dipenuhi oleh hukuman, ancaman, dan larangan tanpa suri teladan dan motivasi. Pasti jiwa merdeka anak didik tidak akan tumbuh dan berkembang.

Merdeka Belajar yang merupakan program menstransformasi sistem pendidikan nasional juga masih kering ideologi Tamansiswa. Pendidikan dan pengajaran melalui merdeka belajar dengan 20 episodenya belum sampai kepada jaminan tumbuh dan berkembangnya jiwa merdeka anak didik yang mengingat kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan secara utuh dan terpadu.

Di lingkungan Tamansiswa sendiri, yang selama puluhan tahun mampu *ngeli ananging ora keli*, ternyata sampai dengan 100 tahun Tamansiswa pada 3 Juli 2022 justru hanyut terhempas oleh bangsanya sendiri. Tanpa mampu emelawani karena *bargaining power* yang sangat rendah. Jangan-jangan *wong tamansiswa* juga sedang terpesona melihat fatamorgananya sendiri? □

***)Ki Sugeng Subagya, Pamong Tamansiswa di Yogyakarta.**

Pojok KR

Bentrok fisik di Babarsari Yogya terjadi lagi.
--Yuk, selesaikan dengan kepala dingin .

Sleman menjadi Kabupaten Kreatif 2022.
--Selamat, pertahankan!

Pande besi di Kulonprogo panen pembuatan golok.
--Bukan untuk klithih, namun untuk nyembelih kambing.

Berabe

Kedaulatan Rakyat

Penerus: Dr H Soemadi SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Padmi Sustitwi, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efti Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Gratis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm ..Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggung-jawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Wakil : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd, Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.